



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TABRANI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **243573**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.750.977.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/225 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 835.395.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 332.145.000
3. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 754.875.000
4. Tanah Seluas 2173 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.741.906.000
5. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 421.344.000
6. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 426.360.000
7. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 421.344.000
8. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 752.400.000
9. Tanah Seluas 26 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 65.208.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.507.500.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT CARBU Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
4. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 299.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2017, LAINNYA Rp.
375.000.000
6. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
668.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	122.220.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.860.531.001
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	11.241.228.001
III. HUTANG	Rp.	2.566.717.742
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.674.510.259

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.